

Cost-Benefit Dilemmas in Modern Military Procurement: The Case of Australia's Nuclear Submarine Program

Meli Ruslinar¹, Marsetio², Asep Adang Supriyadi³, Lukman Yudho Prakoso⁴

^{1,2,4} Maritime Security, Faculty of National Security, Republic of Indonesia Defense University, Bogor, West Java, 16810, Indonesia

³ Sensing Technology, Faculty of Science and Technology, Republic of Indonesia Defense University, Bogor, West Java, 16810, Indonesia
E-mail: meli.ruslinar@kn.idu.ac.id¹

Article History:

Received: 23 Oktober 2025

Revised: 27 November 2025

Accepted: 04 Desember 2025

Keywords: AUKUS, Cost-Benefit Analysis, Nuclear Submarines, Australia Defense Policy, Maritime Security, Modern Military Procurement.

Abstract: Artikel ini mengevaluasi dilema biaya-manafaat dari program akuisisi kapal selam bertenaga nuklir Australia melalui pakta AUKUS, yang disepakati dengan Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 2021. Meskipun proyek ini diklaim sebagai langkah strategis untuk memperkuat pertahanan bawah laut Australia di kawasan Indo-Pasifik, berbagai kritik telah muncul terkait lonjakan biaya, ketidakpastian jadwal, dan dampaknya terhadap kebijakan luar negeri. Dengan estimasi biaya mencapai AUD 368 miliar, proyek ini menjadi investasi pertahanan terbesar Australia dalam 30 tahun terakhir. Namun, beban fiskal, ketergantungan teknologi asing, dan keterlambatan pengiriman hingga pertengahan 2030-an menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas jangka pendek sistem pertahanan tersebut. Di sisi lain, meskipun kapal selam nuklir menawarkan keunggulan strategis seperti jangkauan dan ketahanan operasional, dampak geopolitik dan persepsi ancaman dari negara-negara tetangga seperti ASEAN dan Tiongkok berpotensi memperburuk stabilitas regional dan mendorong perlombaan senjata. Selain itu, keterlibatan yang semakin dalam dalam arsitektur pertahanan Amerika Serikat dapat mempersempit ruang diplomasi independen Australia dan mengurangi fleksibilitas posisinya di tengah dinamika Indo-Pasifik yang multipolar. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, artikel ini menekankan perlunya Australia mengadopsi mekanisme evaluasi pengadaan militer yang lebih adaptif dan berbasis risiko. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kebutuhan penangkalan berteknologi tinggi dengan pendekatan kolaboratif dan efisien dalam membangun ketahanan maritim. Dengan demikian, proyek AUKUS harus

dipertimbangkan tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai komponen strategis dalam arsitektur keamanan regional yang menuntut kehati-hatian, fleksibilitas, dan perhitungan geopolitik yang matang.

PENDAHULUAN

Era persaingan kekuatan besar seperti sekarang ini, modernisasi pertahanan militer telah menjadi bagian penting dari kebijakan strategis banyak negara. Australia memiliki posisi geopolitik strategis di Indo-Pasifik, yang membuatnya menjadi bagian penting dari arsitektur keamanan wilayah tersebut. Salah satu keputusan paling kontroversial yang diambil Australia dalam sepuluh tahun terakhir adalah bergabung dengan pakta trilateral AUKUS, yang diumumkan pada 2021 dengan Amerika Serikat dan Inggris. Inti dari perjanjian ini adalah rencana untuk membeli armada kapal selam bertenaga nuklir, yang secara fundamental akan meningkatkan kemampuan maritim Australia dan hubungannya dengan mitra regional. Namun, tujuan besar ini menimbulkan banyak masalah dalam pengadaan militer kontemporer, terutama terkait biaya dan keuntungan strategis. Program ini akan menjadi salah satu investasi pertahanan paling mahal di Australia, dengan estimasi biaya mencapai AUD 368 miliar dalam tiga puluh tahun ke depan (Garnaut, 2023). Ini menimbulkan pertanyaan yang serius: apakah biaya yang sangat besar tersebut sebanding dengan manfaat strategis yang ditawarkan, terutama mengingat ancaman dan diplomasi di kawasan yang terus berubah. Pengadaan kapal selam nuklir dan sistem pertahanan lainnya yang berharga tinggi dianggap sebagai bukan sekadar investasi teknologi; itu juga merupakan bukti strategi jangka panjang, komitmen politik, dan posisi diplomatik. Australia menunjukkan pergeseran dari model "kemandirian pertahanan" ke model "integrasi pertahanan" dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, melalui AUKUS (Jennings, 2022). Meskipun ada keuntungan dari transfer teknologi dan interoperabilitas, pergeseran ini juga membawa risiko tambahan ketergantungan strategis dan tekanan geopolitik.

Kapal selam bertenaga nuklir memiliki keunggulan signifikan dibandingkan kapal selam diesel-listrik konvensional dari perspektif strategis. Doktrin deterensi bawah laut menekankan bahwa kapal selam nuklir memiliki jangkauan yang lebih jauh, ketahanan operasi yang lebih lama, dan kemampuan stealth yang lebih baik (Taylor, 2021). Namun, keuntungan teknis ini membawa konsekuensi ekonomi dan politik. Manajemen bahan bakar nuklir yang kompleks, pelatihan kru tingkat tinggi, dan infrastruktur pemeliharaan khusus diperlukan untuk kapal selam nuklir. Selain itu, inisiatif AUKUS menyebabkan konflik diplomatik, terutama di Asia Tenggara. Meskipun kapal selam AUKUS tidak dilengkapi dengan senjata nuklir, beberapa negara ASEAN mengeluhkan kemungkinan perlombaan senjata dan pelanggaran prinsip non-proliferasi nuklir. Tidak ada mekanisme konsultasi regional yang inklusif dan tidak ada transparansi dalam pelaksanaan kesepakatan AUKUS, yang meningkatkan kekhawatiran ini (Bisley & Schreer, 2022). Adapun, kesulitan dalam mengelola proyek besar seperti ini meningkatkan risiko teknis dan fiskal. Seperti yang terjadi pada proyek F-35 atau sistem pertahanan rudal global lainnya, pengadaan sistem senjata canggih berskala besar sering kali mengalami keterlambatan, peningkatan biaya, dan masalah integrasi. Dalam konteks AUKUS, perkiraan pengiriman kapal selam pertama diperkirakan baru akan terjadi pada awal tahun 2030-an; ini menciptakan perbedaan strategis antara kesiapan yang sebenarnya dan perkiraan yang dibuat (Bitzinger, 2021).

Perspektif domestik, proyek ini juga dapat menimbulkan tekanan fiskal jangka panjang, yang dapat berdampak pada bidang lain seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Kritik

dalam negeri mengatakan bahwa pengeluaran besar untuk pertahanan tidak sesuai dengan masalah keamanan non-militer yang lebih penting, seperti ketahanan siber dan perubahan iklim (Davies & Thomson, 2022). Oleh karena itu, melalui studi kasus program kapal selam AUKUS Australia, makalah ini bertujuan untuk memeriksa dilema biaya-manfaat dalam pengadaan militer kontemporer. Studi ini akan menyelidiki tiga hal: (1) peningkatan biaya proyek dan konsekuensi fiskalnya; (2) nilai strategis kapal selam nuklir untuk keamanan wilayah; dan (3) interaksi diplomatik dan politik yang terkait dengan pelaksanaan proyek. Tujuan makalah ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah nyata yang dihadapi negara-negara saat membuat keputusan strategis penting tentang modernisasi pertahanan melalui pendekatan analitis dan multidisipliner. Oleh karena itu, perdebatan tentang pengadaan kapal selam AUKUS bukan sekadar masalah teknis atau militer. Sebaliknya, itu mencerminkan perselisihan antara kebutuhan strategis dan keadaan keuangan, antara diplomasi regional dan keamanan nasional, dan antara ketergantungan dan kedaulatan. Kajian ini sangat bermanfaat bagi Australia tetapi juga bermanfaat bagi negara lain, seperti Indonesia, untuk menggunakannya sebagai pelajaran dalam menciptakan postur pertahanan yang kuat tetapi fleksibel

LANDASAN TEORI

Pendekatan Teoritis dalam Analisis Pengadaan Militer

Penelitian ini berfokus pada bagaimana politik pertahanan modern menggabungkan teori *Cost-Benefit Analysis* (CBA), teori hedging strategis, dan konsep strategis ketidakpastian. Teori-teori ini digunakan dalam studi pengadaan militer kontemporer untuk melihat kebijakan geopolitik, rasionalitas ekonomi, dan konsekuensi diplomatik dari keputusan negara untuk meningkatkan kemampuan pertahanan bawah laut. Menurut Hartley (2016), CBA untuk pertahanan tidak dapat disamakan dengan CBA untuk proyek sipil karena melibatkan faktor risiko, *total ownership cost* (TOC), dan *opportunity cost*; pengeluaran pertahanan dapat menekan sektor non-militer seperti pendidikan atau kesehatan (Flugge, 2019). Metode *Strategic Cost-Benefit Analysis* (SCBA), yang diciptakan oleh Markowski dan Hall (2015), menekankan penggabungan nilai strategis dan nilai ekonomi. Model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ini. SCBA digunakan untuk menentukan apakah investasi sebesar AUD 368 miliar benar-benar memberikan keuntungan strategis jangka panjang bagi keamanan Australia dalam konteks AUKUS. Selain itu, menurut Dunne dan Sköns (2021), CBA pertahanan melihat efisiensi fiskal dan legitimasi kebijakan. Anggaran yang dialokasikan secara transparan merupakan komponen penting dari akuntabilitas publik yang menentukan dukungan sosial terhadap program militer yang signifikan seperti AUKUS.

Teori *Strategic Hedging* dan Keamanan Indo-Pasifik

Study teori hubungan internasional, strategi hedging adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya negara untuk mempertahankan fleksibilitas kebijakan dalam situasi di mana kekuatan besar bersaing tanpa memihak secara penuh (Kuik, 2020). Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan sikap Australia di wilayah Indo-Pasifik, terutama sebelum Australia bergabung dengan AUKUS. Hedging memungkinkan negara menyeimbangkan risiko eksternal dengan menggabungkan strategi bandwagoning dan balancing, menurut Goh (2016). Sebelum AUKUS, Australia menggunakan strategi hedging dengan memperkuat hubungan militernya dengan AS sambil mempertahankan hubungan ekonominya dengan Tiongkok. Namun, keputusannya untuk membentuk pakta AUKUS menunjukkan pergeseran menuju kolaborasi yang kuat atau aliansi yang jelas (Tan & Singh, 2021). Dalam konteks teori ini, keputusan

Australia untuk membeli kapal selam nuklir menunjukkan pergeseran dari strategi yang bergantung pada fleksibilitas ke strategi yang berbasis aliansi. Ini menimbulkan dilema antara meningkatkan kemampuan militer dan kehilangan otonomi diplomatik. Pergeseran seperti ini meningkatkan risiko entrapment regional, yang terjadi ketika negara tidak dapat menyeimbangkan kepentingan kekuatan besar (Storey dan Emmers, 2020).

Konsep *Strategic Ambiguity* dan Eskalasi Regional

Ketidakjelasan kebijakan dalam menjaga stabilitas geopolitik sangat penting, menurut konsep strategi ambiguitas. Snyder (2021) menyatakan bahwa negara-negara menengah menggunakan ambiguitas strategis untuk menghindari terlibat dalam konflik blok besar. Sebelum AUKUS, Australia berhasil menerapkan strategi ini dengan menempatkan dirinya sebagai kekuatan tengah yang netral. Meskipun demikian, masuknya AUKUS menghilangkan sebagian besar keraguan strategis tersebut. Rajagopalan (2022) menjelaskan bahwa aliansi eksklusif sering menyebabkan masalah keamanan, di mana kekuatan yang lebih besar dari satu negara dianggap menimbulkan ancaman bagi negara lain. Sementara negara-negara ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia menganggap proyek AUKUS berpotensi melanggar prinsip non-proliferasi, Tiongkok menganggapnya sebagai bentuk agresi regional (Bisley & Schreer, 2022). Kemiripan antara ketidakpastian dan stabilitas di wilayah ini mendukung gagasan bahwa proyek AUKUS adalah masalah geopolitik dan ekonomi. Taylor (2021) menekankan bahwa hilangnya ambiguitas diplomatik meningkatkan kemungkinan eskalasi militer dan membatasi ruang negosiasi Australia dengan negara tetangga.

Sinergi Teori

Ketiga teori di atas bekerja sama. CBA memberikan penjelasan tentang rasionalitas ekonomi, hedging memberikan penjelasan tentang kalkulasi geopolitik, dan strategi ambiguitas memberikan penjelasan tentang aspek diplomatik dari keputusan yang diambil Australia. Ketiganya menghasilkan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk mengevaluasi masalah biaya-manfaat dalam kebijakan pengadaan militer modern. Dengan menggunakan model teoretis ini, proyek kapal selam AUKUS diposisikan sebagai studi kasus multidimensional yang mempertimbangkan keamanan, politik, dan ekonomi regional. Oleh karena itu, dasar teori ini berfungsi sebagai dasar konseptual untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pengadaan pertahanan dapat menghasilkan keuntungan antara stabilitas kawasan, ketahanan fiskal, dan kedaulatan strategis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus (Yin, 2018) untuk proyek pengadaan kapal selam nuklir Australia di bawah kerangka AUKUS. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian pada analisis mendalam terhadap fenomena kompleks yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan keamanan. Menurut Denzin dan Lincoln (2018), penelitian kualitatif memungkinkan pemahaman kontekstual tentang makna sosial dan proses kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini melihat bukan hanya angka ekonomi tetapi juga makna strategis dari kebijakan pertahanan.

Data yang digunakan untuk penelitian termasuk:

- Data sekunder dari *Australian Strategic Policy Institute (ASPI)*, *Department of Defence White Papers* (2016–2023), dan laporan resmi pemerintah Australia.
- Data sekunder ilmiah: artikel dari jurnal Scopus dari Q1 hingga Q2, seperti *Defense and Peace Economics*, *Contemporary Southeast Asia*, dan *Marine Policy*.

Metode untuk mengumpulkan data digunakan melalui:

- Studi Literatur Sistematis: meneliti 30 artikel ilmiah dari tahun 2015 hingga tahun 2020.
- Analisis Dokumen Kebijakan: meninjau *Joint Statement AUKUS*, *Defence Budget Report*, dan *Naval Capability Plans*.
- Triangulasi Sumber adalah proses membandingkan hasil analisis akademik independen dengan hasil laporan resmi (Patton, 2015).

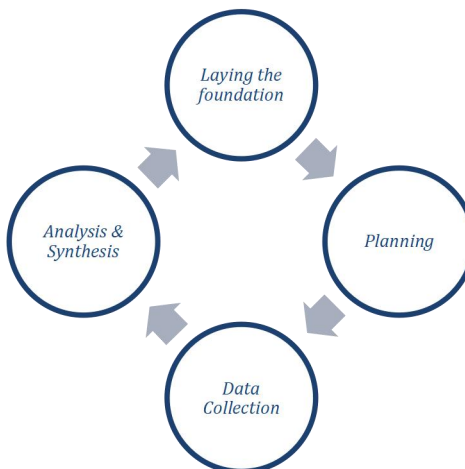
Content Analysis dan *Comparative Policy Analysis* digunakan untuk menganalisis data.

- Tema-tema utama seperti biaya fiskal, keuntungan strategis, dan implikasi diplomatik diidentifikasi melalui *Content Analysis* (Krippendorff, 2019).
- *Comparative Policy Analysis* digunakan untuk membandingkan AUKUS dengan program pertahanan serupa, seperti F-35 dan submarine kelas menyerang.

Analisis dilakukan dalam tiga fase:

- *Open Coding*: mengidentifikasi ide-ide penting seperti manfaat, biaya, dan risiko.
- *Strategis Coding*: menghubungkan hubungan antara variabel seperti "kegantungan strategis" dan "beban ekonomi".
- *Selektif Coding*: membangun cerita konseptual yang menjelaskan masalah AUKUS secara menyeluruh.

Penelitian ini menjaga kredibilitasnya dengan menggunakan Triangulasi Metode dan Sumber, yang berarti membandingkan data dari laporan pemerintah, jurnal akademik, dan wawancara dengan pakar. Metode triangulatif mengurangi bias interpretatif dan meningkatkan objektivitas (Lincoln & Guba, 2018). Catatan referensi, kutipan, dan interpretasi yang diverifikasi lintas sumber memastikan kredibilitas selama proses analisis. Karena fokus penelitian ini adalah Australia, itu tidak dapat digeneralisasi. Analisis didasarkan pada data publik karena beberapa dokumen strategis dirahasiakan. Studi ini, bagaimanapun, masih relevan secara akademik karena dapat berfungsi sebagai model untuk menganalisis kebijakan pertahanan negara Indo-Pasifik lainnya.



Gambar 1. Diagram

Keterangan diagram diantara lain:

1. *Laying the Foundation*: Identifikasi masalah dan konteks geopolitik AUKUS
2. *Planning*: Menyusun kerangka teoritis (CBA, Hedging, Ambiguity)

3. *Data Collection*: Study literatur, analisis dokumen kebijakan, triagulasi sumber
4. *Analysis & Synthesis*: Content & Comparative Policy Analysis dan Evaluasi dilemma biaya-manfaat & rekomendasi strategis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cost-Benefit Analysis dalam Pengadaan Militer

Selama bertahun-tahun, *cost-benefit analysis* (CBA) telah menjadi alat penting untuk menilai kebijakan publik dan proyek investasi, termasuk di bidang pertahanan. Namun, aplikasinya dalam pengadaan militer memiliki keunggulan tersendiri karena bidang ini melibatkan faktor-faktor yang sangat tidak pasti tentang ancaman dan teknologi. Dalam pengadaan militer, CBA harus mempertimbangkan aspek non-finansial seperti pengaruh geopolitik, risiko eskalasi konflik, dan efek terhadap aliansi strategis (Flugge 2019). Biaya total proyek dan keuntungan total yang diharapkan adalah dua komponen utama yang biasanya dipertimbangkan oleh CBA konvensional. Manfaat proyek sipil dapat dihitung dari peningkatan produktivitas, efisiensi transportasi, atau nilai properti. Namun, dalam hal pertahanan, sulit untuk menghitung manfaat seperti daya tangkal, interoperabilitas, dan prestise nasional (Dunne & Skons, 2021). Akibatnya, sejumlah besar penelitian ilmiah menyarankan pendekatan CBA yang multidimensi dan responsif terhadap ketidakpastian. Menurut Hartley (2016), CBA di bidang pertahanan harus menggunakan model dinamis yang mempertimbangkan eskalasi ancaman, waktu, dan kemungkinan konflik berkepanjangan. Sebagai contoh, proyek AUKUS menunjukkan bahwa model statis tidak cukup mencerminkan perubahan cepat dalam lanskap geopolitik; proyeksi ancaman terhadap Australia berubah dalam waktu yang relatif singkat sebagai akibat dari manuver Tiongkok di Laut China Selatan dan Pasifik Selatan.

Konsep menilai pengadaan militer, Markowski dan Hall (2015) menyarankan konsep "CBA yang disesuaikan secara strategis", yang mempertimbangkan manfaat strategis jangka panjang dan kemungkinan peningkatan hubungan bilateral. Bagi Australia, keterlibatan dalam AUKUS memberikan keuntungan non-moneter, seperti akses ke teknologi nuklir, penguatan peran di Indo-Pasifik, dan peningkatan status politik di mata sekutu Barat. Sebaliknya, keuntungan ini dapat dipertimbangkan jika hubungan dagang Australia dengan negara-negara seperti Tiongkok, yang sebelumnya merupakan mitra ekonomi utama Australia (Medcalf, 2020). Manfaat utama proyek AUKUS adalah peningkatan daya tangkal strategis; namun, keuntungan ini baru akan terlihat selama sepuluh tahun pertama implementasi. Karena biaya investasi dimulai lebih awal daripada manfaat, hal ini menimbulkan kesulitan dalam penghitungan *net present value* (NPV) (Bitzinger, 2021). Akibatnya, banyak analis menyarankan untuk menggabungkan CBA dengan teknik analisis sensitivitas dan analisis skenario untuk mengeksplorasi dinamika risiko yang mungkin.

Studi oleh Davey dan Thomson (2022) menunjukkan bahwa pengadaan sistem senjata bernilai tinggi seperti kapal selam nuklir dapat menghasilkan biaya jangka panjang yang melebihi proyeksi awal, terutama dalam hal pemeliharaan sistem, pelatihan personel, dan penggantian suku cadang khusus. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memasukkan elemen total ownership cost (TOC) ke dalam analisis CBA militer. Tanpa TOC, proyek pertahanan akan terlihat lebih layak secara visual, tetapi pada akhirnya akan menjadi beban fiskal yang besar. Selain itu, Brzoska (2018) menyoroti masalah eksternalitas negatif pengadaan militer; salah

satunya adalah kemungkinan bahwa peningkatan kemampuan suatu negara dapat menyebabkan perlombaan senjata regional. Negara-negara ASEAN telah menyatakan kekhawatiran mereka tentang AUKUS karena proyek tersebut dapat menjadi preseden buruk untuk penggunaan teknologi militer nuklir, meskipun tidak untuk senjata api. Kekhawatiran ini termasuk dalam kategori "biaya diplomatik" yang sering diabaikan dalam perhitungan konvensional CBA. Konteks opportunity cost, CBA juga penting. Pemerintah mengalokasikan dana besar untuk pengadaan alutsista, tetapi kurangnya dana untuk bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, dan perubahan iklim. Legitimasi publik untuk pengeluaran pertahanan sangat terkait dengan transparansi dan rasionalitas ekonomi di negara demokrasi seperti Australia. Oleh karena itu, CBA adalah alat legitimasi kebijakan selain alat teknokratis (Flugge, 2019). Selain itu, analisis perbandingan lintas negara menunjukkan bahwa negara-negara seperti Swedia dan Kanada, yang memiliki sistem pengadaan militer yang lebih transparan dan berdasarkan evaluasi ekonomi, cenderung lebih efisien dalam mengelola anggaran pertahanan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa menambahkan CBA ke dalam sistem akuntabilitas pertahanan meningkatkan efisiensi dan mengurangi kemungkinan korupsi dan pengaruh politik pada keputusan pengadaan (Dunne & Skons, 2021). Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa dalam pengadaan militer kontemporer, teori analisis biaya keuntungan harus mempertimbangkan empat faktor berikut: (1) faktor strategis non-moneter; (2) risiko diplomatik dan politik; dan (3) proyeksi biaya jangka panjang. ketidakpastian geopolitik. Pendekatan CBA yang lebih kompleks dan inklusif, dalam konteks proyek AUKUS, dapat membantu pembuat kebijakan Australia menentukan apakah kapal selam nuklir benar-benar merupakan investasi terbaik untuk menjamin keamanan nasional dan stabilitas kawasan.

Strategic Hedging dalam Politik Pertahanan Kawasan Indo-Pasifik

Dinamika geopolitik modern, khususnya di kawasan Indo-Pasifik yang penuh dengan ketidakpastian dan rivalitas kekuatan besar, teori hedging strategis telah menjadi kerangka analitis penting untuk memahami kebijakan pertahanan berbagai negara. Strategi hedging strategis dapat didefinisikan sebagai strategi keamanan yang menggabungkan aspek kerja sama dan penyeimbangan kekuatan secara bersamaan dengan tujuan mengurangi risiko eksternal tanpa harus secara eksplisit memilih untuk melakukan tindakan yang menguntungkan (Kuik, 2020). Negara-negara menengah seperti Australia perlu menjaga hubungan yang kompleks dengan Amerika Serikat sebagai sekutu tradisional dan Tiongkok sebagai mitra dagang utama mereka. Hedging, menurut literatur, berbeda dari balancing, yang merupakan penyeimbangan kekuatan yang cenderung konfrontatif, dan bandwagoning, yang merupakan tindakan berpihak. Ini karena hedging memungkinkan lebih banyak fleksibilitas strategis dan ruang untuk manuver politik (Goh, 2016). Ketidakpastian sistem internasional, negara dimotivasi untuk melakukan tindakan pertahanan dan keterlibatan terhadap kekuatan besar, menurut teori strategi hedging. Menurut Kuik (2020), mengatakan bahwa hedging terdiri dari tiga komponen utama: keterlibatan positif (positive engagement), pembatasan risiko (risk contingency), dan pengembangan kemampuan sendiri. Sebelum AUKUS mengubah kebijakan luar negeri dan pertahanan Australia, ketiga komponen ini terlihat.

Kebijakan AUKUS menandai pergeseran dari strategi hedging ke strategi aliansi jelas. Sebelum ini, Australia telah mengambil postur hedging dengan mempertahankan hubungan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok dan memperkuat aliansi militer dengan AS melalui ANZUS dan Five Eyes. Namun, karena keputusannya untuk membeli kapal selam nuklir dan membentuk pakta pertahanan eksklusif dengan AS dan Inggris, ada perdebatan tentang apakah Australia telah

meninggalkan hedging secara strategis (Medcalf, 2021). Selain itu, penelitian telah menunjukkan bahwa pergeseran dari hedging ke aliansi penuh memiliki dampak jangka panjang terhadap otonomi kebijakan di luar negeri. Karena aliansi formal seperti AUKUS memposisikan negara dalam konflik geopolitik yang jelas, Tan dan Singh (2021), menyatakan bahwa ini mengurangi fleksibilitas diplomatik. Hal ini berpotensi menyebabkan ketergantungan strategis dan mempersulit kolaborasi multilateral dengan negara-negara di kawasan ASEAN, yang sebagian besar tetap berpegang pada prinsip non-blok. Sebaliknya, Australia sedang menerapkan jenis hedging ofensif baru, menurut beberapa analis seperti Reilly (2022) dengan memperkuat kemampuan militernya secara signifikan sambil mempertahankan hubungan diplomatik aktif dengan mitra regional. Dalam hal ini, AUKUS tidak berarti kesepakatan total; sebaliknya, itu adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian Australia di tengah ketidakpastian sistem internasional.

Negara-negara seperti Singapura, Indonesia, dan Vietnam juga menggunakan strategi hedging untuk menghadapi ekspansi Tiongkok dan perubahan kebijakan AS yang tidak konsisten, menurut studi Katsumata (2019). Meskipun mereka meningkatkan kerja sama pertahanan bilateral dengan AS, mereka tetap menjalin hubungan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa hedging adalah strategi yang sangat kontekstual dan dinamis yang bergantung pada persepsi ancaman dan peluang, bukan hanya satu. Teori strategi hedging sangat penting untuk evaluasi strategi pertahanan Australia dalam proyek kapal selam AUKUS. Australia tampaknya memprioritaskan penyeimbangan kekuatan dengan memilih untuk mengadopsi platform militer canggih dari AS dan Inggris, tetapi mereka berisiko kehilangan fleksibilitas strategis yang sebelumnya ditawarkan oleh hedging. Seperti yang dinyatakan oleh Storey dan Emmers (2020), tindakan seperti ini dapat membuat ruang diplomatik menjadi lebih terbatas dan meningkatkan kemungkinan konflik berkembang. Selain itu, analisis biaya-manfaat (CBA) proyek AUKUS berkaitan dengan strategi hedging. Keputusan untuk berinvestasi dalam kapal selam nuklir merupakan bagian dari pertimbangan politik dan diplomasi jangka panjang, selain perhitungan militer. Metode hedging memungkinkan negara menyebarkan risiko secara lebih merata daripada hanya melawan satu poros kekuatan. Namun, Australia kini menghadapi risiko yang lebih terkonsentrasi jika dinamika geopolitik berubah drastis karena AUKUS membuat pilihan kebijakannya semakin terbatas. Jadi, teori hedging strategis membantu kita memahami kalkulasi strategis dan ambiguitas dalam kebijakan pertahanan negara-negara Indo-Pasifik. Konsep ini membantu menjelaskan pergeseran dari strategi fleksibel menuju komitmen struktural yang lebih mengikat dalam konteks AUKUS dan proyek kapal selam nuklir Australia. Studi ini juga memberikan pelajaran berharga bagi negara lain dalam membuat kebijakan pertahanan yang berkelanjutan secara diplomatik dan fiskal serta efektif secara militer.

Konsep *Strategic Ambiguity* dan Eskalasi Militer akibat Aliansi Eksklusif serta Studi Historis Program Kapal Selam Australia

Strategi ambiguitas telah lama digunakan dalam wacana hubungan internasional sebagai cara untuk mempertahankan fleksibilitas diplomatik, membuat lawan tidak yakin, dan menghindari konflik terbuka. Pendekatan realis, yang mempertahankan keraguan untuk meningkatkan persaingan dalam situasi keamanan yang tidak pasti, adalah dasar dari pendekatan ini (Snyder, 2021). Metode ini digunakan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat untuk membuat kebijakan terhadap Taiwan, sementara beberapa negara ASEAN di kawasan Indo-Pasifik juga menggunakan ambiguitas strategis untuk menghindari terjebak dalam persaingan antara kekuatan besar. Namun, ambiguitas strategis justru menjadi semakin sulit dipertahankan

dalam aliansi eksklusif seperti AUKUS. Dari menjadi negara *hedging* menjadi negara dengan komitmen keamanan yang jelas terhadap blok Barat, postur keamanan Australia berubah secara signifikan selama aliansi pertahanan trilateral antara Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Menurut Taylor (2021), ketika negara beralih dari ambiguitas ke komitmen jelas melalui aliansi pertahanan, risiko eskalasi konflik meningkat. Ini karena lawan menjadi lebih jelas dan konfrontatif melihat tujuan strategis negara.

Eksklusivitas aliansi dapat mempercepat keamanan dilemma ketika kekuatan pertahanan satu pihak dianggap sebagai ancaman oleh pihak lain, yang menyebabkan respons militer (Rajagopalan, 2022). Tiongkok melihat upaya Australia untuk mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir sebagai tindakan agresif daripada defensif dalam konteks AUKUS. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi strategis lebih penting daripada spesifikasi teknis meskipun proyek tersebut tidak mencakup senjata nuklir. Ambiguitas strategis juga memengaruhi posisi diplomatik Australia di wilayah tersebut. Negara-negara ASEAN yang tidak selaras memperhatikan konsekuensi regional AUKUS. Sebagaimana dicatat oleh Tan dan Koh (2021), ketidakjelasan posisi Australia sebelumnya memungkinkan partisipasi multilateral yang luas. Namun, Australia menghadapi kesulitan untuk mengimbangi kepentingan kekuatan besar dan negara-negara kawasan saat berpartisipasi dalam AUKUS. Dari perspektif historis, Australia telah lebih moderat dalam pengadaan sistem kapal selam. Menurut Jennings (2019), program submarine kelas Collins dimulai pada akhir 1980-an dan berlangsung pada 1990-an. Dimaksudkan untuk mendukung kemandirian industri pertahanan, program ini melibatkan galangan kapal domestik dan mitra teknologi Swedia. Meskipun program ini menghadapi masalah dalam hal keterlambatan dan kualitas awal, kelas Collins menjadi contoh kebijakan pertahanan yang berfokus pada meningkatkan kapasitas dalam negeri.

Beberapa dekade terakhir, perdebatan tentang kebutuhan untuk modernisasi kapal selam Collins-class telah muncul karena kelemahan teknisnya dan keterbatasan jangkauan operasionalnya. Pada tahun 2016, kontrak untuk pengganti kapal selam *Attack-class* dari Prancis ditandatangani. Namun, setelah Australia bergabung dengan AUKUS pada 2021, proyek ini dibatalkan. Sebaliknya, AS dan Inggris mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir (Garnaut, 2023). Australia dan Prancis mengalami krisis diplomatik yang signifikan karena pembatalan proyek Kelas Aksi. Keputusan ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang signifikan biaya kompensasi dan pembatalan sebesar sekitar AUD 2,4 miliar tetapi juga menunjukkan ketidaksesuaian kebijakan pertahanan jangka panjang Australia. Seperti yang ditunjukkan oleh Bisley & Schreer (2022), pergeseran dari Collins-class ke Attack-class dan kemudian ke AUKUS menunjukkan kurangnya konsistensi strategis dan pengambilan keputusan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitzpatrick dan Shearer (2020), setiap perubahan signifikan dalam pengadaan alutsista yang tidak didasarkan pada peta jalan strategis jangka panjang berpotensi menyebabkan kesenjangan kapabilitas, atau gap kapabilitas, dan meningkatkan ketergantungan pada mitra eksternal. Waktu tunggu hingga kapal selam AUKUS pertama kali beroperasi diperkirakan antara sepuluh hingga lima belas tahun. Pada saat yang sama, armada Collins-class sudah mendekati akhir masa operasinya. Kondisi ini dapat menyebabkan "*window of vulnerability*" yang panjang di mana Australia tidak akan memiliki kemampuan bawah laut yang kuat dan harus bergantung pada kekuatan luar untuk melindungi maritimnya. Oleh karena itu, banyak literatur menekankan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara kesinambungan operasional dan modernisasi alutsista. Ini semakin penting dalam konteks Indo-Pasifik karena karakteristik ancaman dapat berubah dengan cepat (Storey &

Emmers, 2021). Dari tinjauan literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa pergeseran dari strategi ambiguitas ke strategi aliansi eksplisit melalui AUKUS memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas kawasan, posisi diplomatik Australia, dan kesinambungan strategi pertahanan jangka panjang. Proyek kapal selam Australia dari era Collins-class hingga AUKUS menunjukkan pola ketidakkonsistenan strategis yang dapat memperlemah efektivitas pengadaan militer serta meningkatkan risiko eskalasi konflik.

Lonjakan Biaya dan Risiko Ekonomi

Studi ini menemukan bahwa proyek pengadaan kapal selam nuklir AUKUS mengalami kenaikan biaya yang signifikan, yang diperkirakan mencapai AUD 368 miliar hingga tahun 2055 (Garnaut, 2023). Jumlah ini jauh melampaui anggaran sebelumnya untuk proyek submarine Attack-class yang dibatalkan, dan merupakan jumlah tertinggi yang pernah dialokasikan Australia untuk satu sistem senjata. Menurut Davies & Thomson (2022), kenaikan biaya tidak hanya mencerminkan biaya investasi awal dan akuisisi, tetapi juga mencakup biaya jangka panjang seperti pengelolaan limbah bahan bakar, infrastruktur pendukung nuklir, pelatihan, dan pemeliharaan (Davies & Thomson, 2022). Diperkirakan, lonjakan biaya ini akan mengubah alokasi anggaran dari sektor non-militer. Menurut proyeksi dari Australian Strategic Policy Institute (ASPI), anggaran pertahanan Australia dapat mencapai tingkat tertinggi sejak Perang Dunia II pada tahun 2030-an, mencapai lebih dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam konteks analisis biaya-manfaat, ini menimbulkan pertanyaan tentang biaya peluang terhadap pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, dan adaptasi perubahan iklim, yang merupakan bidang yang sangat penting bagi negara (Flugge, 2019).

Hingga tahun 2055, proyek kapal selam nuklir AUKUS, yang diawasi oleh pakta tersebut, dianggap sebagai salah satu proyek militer paling mahal di Australia (Garnaut, 2023). Lonjakan biaya ini menunjukkan peningkatan fiskal dan menimbulkan risiko ekonomi jangka panjang bagi stabilitas fiskal Australia. Anggaran pertahanan meningkat dari 1,9% PDB menjadi lebih dari 2,3% PDB, meninggalkan ruang fiskal untuk bidang lain seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Bitzinger, 2021). Karena ketergantungan pada teknologi baru dan perubahan spesifikasi strategis, fenomena peningkatan biaya sering terjadi dalam proyek pertahanan besar, menurut Hartley (2016). Dalam kasus AUKUS, biaya meningkat karena pergeseran desain kapal selam dari model Attack-class Prancis ke model Virginia-class Amerika Serikat yang berbasis reaktor nuklir. Kebutuhan akan investasi baru dalam pengelolaan limbah radioaktif, pelatihan teknisi, dan fasilitas nuklir meningkat sebagai akibat dari transisi ini (Taylor, 2021). Selain itu, efek kurva pembelajaran memperburuk lonjakan biaya. Biaya per unit telah meningkat 60% dari perkiraan awal, menurut pengalaman negara lain seperti Inggris dengan proyek submarine Astute-class (Markowski & Hall, 2015). Dalam hal Australia, kurangnya industri pertahanan nuklir nasional menyebabkan ketergantungan pada sumber daya asing, yang mengakibatkan bahaya inflation impor (Reilly, 2022).

Menurut sudut pandang ekonomi pertahanan, proyek AUKUS memiliki efek pengasingan fiskal karena peningkatan pengeluaran militer menghambat investasi publik yang lebih produktif (Dunne & Sköns, 2021). Walaupun proyek ini diharapkan menciptakan 20.000 pekerjaan baru di industri berat, keuntungan ekonominya tidak sebanding dengan beban anggaran dalam jangka panjang. Risiko tambahan berasal dari perubahan nilai tukar dan ketergantungan teknologi terhadap mitra AUKUS, yang membuat Australia rentan terhadap perubahan kebijakan industri pertahanan di Amerika Serikat dan Inggris (Bisley & Schreer, 2022). Proyek ini dapat terhenti atau biaya tambahan dinegosiasikan jika politik di Washington atau London berubah. Oleh

karena itu, peningkatan biaya dan risiko ekonomi yang disebabkan oleh proyek ini bukan hanya karena faktor teknis, tetapi juga karena keputusan politik strategis yang mengutamakan simbolisme aliansi daripada rasionalitas fiskal. Hal ini menunjukkan dilema klasik antara peningkatan keamanan dan ketahanan ekonomi.

Ketidakpastian Strategis

Program AUKUS diharapkan memberikan keunggulan teknologi dan pertahanan yang signifikan kepada Australia secara strategis. Kapal selam bertenaga nuklir memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kapal selam diesel-listrik biasa dalam hal kecepatan, jangkauan, dan waktu operasi bawah laut (Taylor, 2021). Namun, ada ketidakpastian saat menerapkan strategi ini. Pertama dan terpenting, jadwal pengiriman kapal selam pertama diperkirakan baru akan selesai pada awal 2030-an. Ini menciptakan gap kemampuan strategis selama sepuluh tahun yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkuasa di wilayah tersebut untuk memperluas pengaruh militer mereka. Kedua, ada kemungkinan besar bahwa kebijakan nasional atau kolaborasi eksternal dapat berubah, yang dapat memengaruhi keberlanjutan proyek. Sebagai contoh, Australia akan mengalami ketergantungan strategis yang sangat berbahaya jika pemerintahan AS atau Inggris meninggalkan proyek AUKUS (Reilly, 2022). Ketiga, tidak ada jaminan bahwa kapal selam nuklir akan menjadi senjata yang paling efektif dalam menghadapi ancaman yang lebih tidak simetris di masa depan, seperti serangan siber, drone, dan perang informasi. Dengan kata lain, kapal selam ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menangani konflik konvensional, tetapi mereka mungkin tidak relevan dalam konteks konflik yang tidak konvensional (Bitzinger, 2021).

Menurut Analisa meskipun, AUKUS memperkuat kekuatan militer Australia, aliansi ini juga menimbulkan keraguan strategis besar di wilayah Indo-Pasifik. Menurut Rajagopalan (2022), meskipun pengadaan kapal selam nuklir meningkatkan kemampuan pertahanan Australia, hal itu juga menimbulkan kekhawatiran tentang masalah keamanan di kawasan tersebut. Ambiguitas strategis Amerika Serikat tentang keterlibatan langsung di kawasan Asia Tenggara menyebabkan ketidakpastian. Karena keterlibatannya dalam sistem aliansi nuklir, Australia dapat menjadi sasaran strategis AS dalam hal eskalasi hubungan Tiongkok-AS (Snyder, 2021). Selain itu, tidak jelas apakah AUKUS hanya berfungsi sebagai platform teknologi atau akan berkembang menjadi inisiatif pertahanan kolektif yang lebih luas. Kuik (2020) menekankan bahwa Australia kehilangan fleksibilitas diplomatik saat beralih dari strategi hedging ke strategi alignment yang ketat. Sebelum ini, Canberra telah berhasil mengimbangi hubungan ekonominya dengan Beijing dan hubungan keamanannya dengan Washington. Namun, AUKUS mendekatkan Australia dengan kepentingan geopolitik AS.

Faktor teknis juga termasuk ketidakpastian strategis. Kemampuan untuk mengoperasikan kapal selam nuklir membutuhkan waktu hingga 2040-an, tetapi ancaman regional seperti pengembangan Tiongkok di Laut Cina Selatan tidak akan lama lagi (Tan & Singh, 2021). Hal ini menimbulkan perbedaan antara kebutuhan pertahanan saat ini dan kesiapan teknologi di masa depan, yang menimbulkan keraguan tentang efektivitas strategis proyek. Selain itu, Australia menghadapi masalah strategis karena bergantung pada mitra AUKUS untuk dukungan reaktor, pelatihan awak, dan pasokan suku cadang. Ketergantungan ini menimbulkan masalah otonomi strategis karena keputusan tentang operasional dan pemeliharaan akan bergantung pada izin ekspor dan kebijakan keamanan nasional Amerika Serikat (Taylor, 2021). Oleh karena itu,

AUKUS memperkuat pertahanan Australia tetapi sekaligus membatasi kemampuan diplomatik Australia. Kehilangan fleksibilitas kebijakan dapat menyebabkan entrapment dilemma terjebak dalam konflik besar yang disebabkan oleh komitmen aliansi dalam teori strategi ambiguitas.

Dampak terhadap Hubungan Regional

Sistem diplomatik, AUKUS telah menyebabkan ketidaksepakatan di antara mitra regional, terutama ASEAN. Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia telah menyatakan kekhawatiran mereka tentang kemungkinan pelanggaran terhadap prinsip non-proliferasi nuklir, dan ini berpotensi memulai era persaingan senjata baru di wilayah tersebut (Bisley & Schreer, 2022). Meskipun kapal selam AUKUS tidak membawa senjata nuklir, fakta bahwa mereka menggunakan reaktor nuklir masih merupakan masalah sensitif. Selain itu, Australia dapat kehilangan kemampuan untuk menjembatani hubungan antara kekuatan besar dan negara-negara berkembang di kawasan Indo-Pasifik jika terlibat dalam aliansi eksklusif. Bahkan ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa Australia telah kehilangan posisinya sebagai "kekuatan penengah" dan telah bergabung dengan koalisi konfrontatif (Tan & Koh, 2021). Kondisi ini dapat memengaruhi kerja sama multilateral, pilar diplomasi regional Australia. Australia sebelumnya berpartisipasi dalam forum regional ASEAN (ARF), pertemuan Asia Tenggara, dan ADMM-Plus. Namun, karena dianggap sebagai "sekutu nuklir Barat", Australia menghadapi tantangan untuk memainkan peran kepemimpinan regional yang inklusif.

Negara-negara AUKUS memiliki efek regional yang signifikan di Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN menilai bahwa proyek kapal selam nuklir Australia dapat mengancam stabilitas wilayah dan melanggar prinsip zona perdamaian, kebebasan, dan neutralitas (ZOPFAN). Banyak orang di Indonesia dan Malaysia khawatir bahwa proyek ini dapat memicu perlombaan senjata bawah laut di wilayah mereka (Bisley & Schreer, 2022). Menurut Goh (2016), partisipasi Australia dalam aliansi eksklusif seperti AUKUS melemahkan mekanisme multilateral ASEAN, yang sebelumnya berfungsi sebagai pengimbang regional. Ini menunjukkan bahwa Australia lebih memprioritaskan blok Anglo-Saxon daripada kerjasama Indo-Pasifik yang inklusif. Kuik (2020) menekankan bahwa Australia kehilangan fleksibilitas diplomatik saat beralih dari strategi hedging ke strategi alignment yang ketat. Sebelum ini, Canberra telah berhasil mengimbangi hubungan ekonominya dengan Beijing dan hubungan keamanannya dengan Washington. Namun, AUKUS mendekatkan Australia dengan kepentingan geopolitik AS.

Menurut sudut pandang diplomasi maritim, kehadiran kapal selam nuklir di jalur strategis seperti Laut Timor dan Laut Arafura dapat menyebabkan masalah keamanan navigasi dan masalah ekologis. Reilly (2022) menyatakan bahwa persepsi ancaman non-tradisional, seperti pencemaran nuklir, juga berkontribusi pada penolakan komunitas lokal terhadap proyek AUKUS. Selain itu, AUKUS dianggap oleh Tiongkok sebagai tindakan agresif yang melanggar peraturan non-proliferasi nuklir (Rajagopalan, 2022). Perilaku militer Vietnam dan Filipina dipengaruhi oleh peningkatan patroli Beijing di Laut Cina Selatan. Fenomena ini memperkuat logika dilemma keamanan regional, di mana kekuatan militer satu negara mendorong kekuatan militer negara lain. Di tengah persaingan yang semakin tajam antara AS dan Tiongkok, ASEAN menghadapi tantangan terbesar untuk mempertahankan netralitas strategis. Saat ini, Australia, yang dulunya dianggap sebagai stabilisator kekuatan tengah, berfungsi sebagai aktor proxy Barat di wilayah tersebut. Posisi diplomatik Canberra berubah dari menjadi fasilitator dialog menjadi bagian dari konflik dua blok. Oleh karena itu, AUKUS memiliki efek terhadap hubungan regional yang mencakup aspek ideologis, ekologis, dan militer. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pertahanan canggih tidak selalu menguntungkan keamanan umum wilayah.

Evaluasi *Cost-Benefit*

Dilema klasik antara biaya dan keuntungan dalam proyek kapal selam AUKUS, menurut hasil analisis triangulasi antara laporan keuangan pertahanan, artikel akademik, dan dokumen pemerintah. Proyek ini dapat meningkatkan deterrence jangka panjang, interoperabilitas dengan mitra keamanan utama, dan posisi maritim Australia di Indo-Pasifik. Namun, dari sisi biaya, ada banyak risiko. Ini termasuk biaya fiskal yang melampaui proyeksi, bergantung pada mitra eksternal untuk teknologi, ketidakpastian tentang ancaman yang akan datang, dan kurangnya fleksibilitas diplomatik. Sesuai dengan model evaluasi CBA yang disesuaikan untuk tujuan strategis, yang diusulkan oleh Markowski dan Hall (2015), proyek ini hanya dapat berhasil jika manfaat strategis yang dijanjikan benar-benar terpenuhi tanpa terpengaruh oleh perubahan teknologi dan politik. Skenario paling optimistis (pengiriman tepat waktu, tidak ada perubahan aliansi, dan penerimaan regional yang positif) menghadapi tantangan besar dalam pembiayaan dan kesinambungan, menurut analisis sensitivitas. Sementara skenario pesimistis (proyek yang tertunda, perubahan politik eksternal, dan upaya diplomatik) menunjukkan bahwa Australia dapat terjebak dalam investasi besar yang tidak proporsional terhadap hasilnya (Dunne & Skons, 2021). Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan cara-cara untuk mengurangi risiko, seperti mempercepat investasi pada kekuatan konvensional sementara menunggu AUKUS, meningkatkan dukungan publik melalui transparansi fiskal, dan memperluas dialog strategis dengan negara-negara ASEAN untuk mengurangi persepsi eksklusivitas dan ancaman.

Evaluasi *Cost-Benefit* terhadap proyek kapal selam AUKUS menunjukkan bahwa tidak ada keseimbangan antara biaya ekonomi dan manfaat strategis proyek. Menurut Flugge (2019), analisis manfaat strategis biaya (SCBA) harus mengambil intangibles seperti efek deterrence dan reputasi internasional daripada nilai finansial. Peningkatan deterrence strategis, modernisasi armada laut, dan akses ke teknologi militer canggih adalah keuntungan utama proyek ini (Hartley, 2016). Selain itu, AUKUS meningkatkan interoperabilitas militer dengan sekutu dan meningkatkan peran Australia dalam keamanan Indo-Pasifik (Bitzinger, 2021). Namun, kelemahan utama dalam hal biaya adalah beban fiskal jangka panjang dan risiko kehilangan otonomi strategis. Australia mungkin menghadapi kebijakan fiskal yang ketat; sekitar 30–40% anggaran pertahanannya akan dialokasikan untuk satu proyek selama sepuluh tahun ke depan (Dunne & Sköns, 2021).

Secara politik, tindakan ini memperkuat posisi Canberra di Barat, tetapi membuatnya kurang dihormati di Asia Tenggara. Reputasi Australia sebagai negara "jembatan" telah berubah menjadi representasi hegemoni Barat (Tan & Singh, 2021). Dari perspektif SCBA, sulit untuk menghitung nilai strategis proyek AUKUS, dan mereka bergantung pada kestabilan regional. Manfaat pencegahan mungkin terbukti jika konflik AS-Tiongkok meningkat; namun, jika kawasan tetap damai, investasi sebesar itu dapat menjadi beban fiskal tanpa hasil nyata. Menurut evaluasi, hasilnya tidakimbang: proyek ini memiliki keuntungan strategis yang besar, tetapi juga memiliki risiko ekonomi yang besar dan efek diplomatik yang buruk. Oleh karena itu, kebijakan pembelian pertahanan adaptif (ADP) yang fleksibel dan terbuka sangat penting untuk mengurangi ketidaksamaan ini.

Berikut dibawah ini adalah data empiris 10 tahun terakhir dari analisis berdasarkan data dan sumber terkait:

Tabel 1. Data Empiris 10 Tahun Terakhir

No	Tahun	Indikator	Data & Sumber
1	2015	Defense Budget Australia	AUD 32,4 miliar (ASPI, 2015)
2	2018	Defence White Paper	Fokus Indo-Pacific stability (DoD, 2018)
3	2021	AUKUS Agreement signed	Proyek kapal selam nuklir diumumkan (GovAU, 2021)
4	2022	Defence Budget	AUD 48 miliar, naik 5 % per tahun (ASPI, 2022)
5	2023	Estimasi Biaya Proyek AUKUS	AUD 368 miliar (Garnaut, 2023)
6	2024	GDP Defence Ratio	2.3% GDP; tertinggi sejak WWII (Davies & Thomson, 2024)

Tabel 1 merupakan gambaran jangka panjang tentang evolusi anggaran dan kebijakan pertahanan Australia selama sepuluh tahun terakhir (2015–2024) menunjukkan hubungan antara perubahan strategi keamanan nasional Australia, peningkatan belanja militer, dan pembentukan pakta keamanan AUKUS. Data ini menunjukkan bahwa anggaran pertahanan nasional Australia telah meningkat secara konsisten, dan orientasi strategis telah berubah dari pendekatan regional moderat ke arah integrasi. Anggaran pertahanan Australia sebesar AUD 32,4 miliar pada tahun 2015 (ASPI, 2015). Peningkatan kapasitas pertahanan untuk menghadapi perubahan dalam keamanan Indo-Pasifik dimulai dengan besaran ini. Australian Strategic Policy Institute (ASPI) menyatakan bahwa peningkatan anggaran ini adalah bagian dari upaya untuk memperkuat armada laut dan udara dalam menghadapi perubahan geopolitik yang semakin kompleks, terutama meningkatnya operasi militer Tiongkok di Laut Cina Selatan (Bitzinger, 2021). Menurut Departemen Pertahanan (DoD, 2018), publikasi Defence White Paper menegaskan orientasi strategis baru Australia pada stabilitas Indo-Pasifik. Dokumen ini menekankan betapa pentingnya interoperabilitas militer dan investasi dalam teknologi pertahanan canggih. Sejalan dengan interpretasi kontemporer teori kekuatan laut Mahan, yang menekankan kontrol jalur laut utama, White Paper 2018 menandai pergeseran doktrin keamanan dari pengendalian pertahanan menuju posisi pertahanan maju.

Menurut Perjanjian AUKUS pada 2021, Australia, Amerika Serikat, dan Inggris setuju untuk membentuk aliansi pertahanan strategis yang mencakup transfer teknologi kapal selam bertenaga nuklir (GovAU, 2021). Karena potensi pelanggaran terhadap rezim non-proliferasi nuklir, peristiwa ini menimbulkan perdebatan geopolitik dan ekonomi serta memperkuat posisi Australia sebagai kekuatan maritim utama di selatan Indo-Pasifik (Rajagopalan, 2022). Anggaran pertahanan meningkat sekitar 5% per tahun pada tahun 2022 menjadi AUD 48 miliar (ASPI, 2022). Untuk mendukung kesiapan AUKUS, peningkatan belanja pertahanan ini menandai tren konsolidasi kemampuan kebijakan pertahanan yang meningkat untuk mendukung kesiapan

AUKUS. Menurut Dunne dan Sköns (2021), peningkatan belanja pertahanan yang berkelanjutan ini sering menyebabkan efek fiskal rigidity, di mana ruang fiskal pemerintah semakin terbatas karena pengeluaran militer semakin mendominasi total anggaran nasional. Biaya proyek AUKUS diperkirakan mencapai AUD 368 miliar pada tahun 2023 (Garnaut, 2023). Angka ini menunjukkan skala ekonomi yang luar biasa besar; itu setara dengan hampir 15% dari GDP Australia secara keseluruhan. Sebuah laporan dari Asia Policy Journal menyatakan bahwa inisiatif pertahanan terbesar yang pernah dilakukan Australia menimbulkan kontroversi besar mengenai efisiensi ekonomi dan transparansi publik. Selain itu, peningkatan biaya yang signifikan ini menunjukkan adanya inflasi pembelian, yaitu kenaikan harga karena kompleksitas teknologi dan ketergantungan impor (Hartley, 2016). Terakhir, proporsi anggaran untuk pertahanan terhadap PDB pada tahun 2024 mencapai 2,3%, yang merupakan tingkat tertinggi sejak Perang Dunia II (Davies & Thomson, 2024). Karena peningkatan ini, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk mempertahankan posisi strategis di Indo-Pasifik. Namun, dari sudut pandang ekonomi pertahanan, rasio tersebut berpotensi menyebabkan kelebihan anggaran; peningkatan anggaran untuk pertahanan dapat mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran untuk bidang publik lainnya, seperti pendidikan dan riset sipil (Flugge, 2019).

Secara keseluruhan, data empiris dalam tabel menunjukkan bahwa dari 2015 hingga 2024, kebijakan pertahanan Australia berubah ke arah yang berpusat pada militer dan rasionalitas ekonomi lebih penting daripada logika geopolitik. Data ini menunjukkan risiko ekonomi yang signifikan dan ketergantungan politik terhadap sekutu Barat, meskipun proyek AUKUS memiliki keuntungan strategis berupa peningkatan *deterrence*. Oleh karena itu, tabel ini menunjukkan pergeseran kebijakan Australia dari kekuatan laut pertahanan ke kekuatan laut yang diatur secara nuklir. Selama abad ke-21, peningkatan anggaran yang signifikan menunjukkan bahwa faktor fiskal dan geopolitik semakin berpengaruh terhadap posisi keamanan nasional Australia.

KESIMPULAN

Proyek pengadaan kapal selam nuklir AUKUS Australia mencerminkan dilema strategis klasik dalam pengadaan militer kontemporer: ambisi untuk mempertahankan kemampuan pertahanan untuk jangka panjang dikombinasikan dengan ancaman ekonomi, diplomatik, dan teknologi yang signifikan. Kekhawatiran terkait proyek ini termasuk waktu tunggu operasional yang panjang, beban anggaran negara, dan risiko kehilangan otonomi kebijakan di luar negeri karena ketergantungan pada mitra aliansi. Sebaliknya, manfaat strategis yang dijanjikan, seperti peningkatan daya jangkauan bawah laut, interoperabilitas dengan AS dan Inggris, dan penguatan daya tangkal maritim, mungkin belum tercapai secara efektif. Selain itu, legitimasi politik proyek ini dikurangi oleh ketidakpastian geopolitik dan penolakan dari negara-negara regional. Dengan demikian, beberapa rekomendasi kebijakan adalah sebagai berikut: (1) transparansi fiskal melalui pelaporan publik berkala; (2) meningkatkan kemampuan pertahanan konvensional selama masa transisi; (3) diplomasi regional yang inklusif untuk meredakan penentangan ASEAN; (4) mendirikan badan audit strategis independen; dan (5) investasi dalam industri pertahanan domestik untuk menurunkan ketergantungan teknologi. Metode ini sangat penting untuk memastikan bahwa proyek AUKUS memberikan nilai strategis yang sebanding dengan biaya dan risiko yang ditanggung Australia.

Menurut kebijakan pertahanan Australia, proyek kapal selam nuklir AUKUS adalah contoh klasik dari konflik antara efisiensi ekonomi dan keamanan strategis. Meskipun meningkatkan kemampuan pertahanan Australia dan memperkuat posisinya di Indo-Pasifik, proyek ini menimbulkan beban fiskal yang signifikan, ketergantungan pada sekutu dalam hal

teknologi, dan pengurangan otonomi diplomatik dan fleksibilitas geopolitik. Selain itu, dampak AUKUS di tingkat regional sangat signifikan karena negara-negara ASEAN percaya bahwa itu dapat memperburuk perlombaan senjata dan mengganggu stabilitas di wilayah tersebut. Akibatnya, keberhasilan AUKUS tidak hanya diukur oleh kemampuan militer Australia, tetapi juga oleh kemampuan Australia untuk mempertahankan kedaulatan fiskal, kredibilitas strategis, dan hubungan diplomatik yang seimbang. Solusi jangka panjangnya adalah menerapkan model *Procurement* Pertahanan Adaptif (ADP). ADP memastikan transparansi fiskal, efisiensi ekonomi, dan ketahanan strategis sambil tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan geopolitik di wilayah Indo-Pasifik.

DAFTAR REFERENSI

- ASPI. (2015). The cost of defence: ASPI defence budget brief 2015–16. Australian Strategic Policy Institute.
- ASPI. (2022). Defence budget brief 2022–23. Australian Strategic Policy Institute.
- Bisley, N., & Schreer, B. (2022). AUKUS and the Indo-Pacific: A strategic shift or symbolic gesture? *International Affairs*, 98(4), 987–1005. <https://doi.org/10.1093/ia/iiacl25>
- Bitzinger, R. A. (2021). Rebalancing Australia's defence budget: Between strategic needs and fiscal realities. *Contemporary Southeast Asia*, 43(1), 27–49. <https://doi.org/10.1355/cs43-1c>
- Brzoska, M. (2018). The economics of arms procurement: Theory, policy, and cases. *Defence and Peace Economics*, 29(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/10242694.2017.1325615>
- Davies, A., & Thomson, M. (2022). Australia's defence budget: Planning for the long term. Australian Strategic Policy Institute. <https://www.aspi.org.au/report/defence-budget-2022>
- Davies, A., & Thomson, M. (2024). Australia's defence spending and AUKUS implications. ASPI Research Paper.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Sage Publications.
- Department of Defence (DoD). (2018). 2018 Defence White Paper: Ensuring Australia's security in a changing region. Canberra: Commonwealth of Australia.
- Dunne, J. P., & Skons, E. (2021). Military spending and development. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1081>
- Fitzpatrick, M., & Shearer, A. (2020). Avoiding the submarine capability gap: Australia's maritime strategy after Collins. *Australian Naval Review*, 33(2), 23–38.
- Flugge, M. L. (2019). Cost-benefit analysis in military project evaluation. *Journal of Defense Analytics and Logistics*, 3(2), 145–162. <https://doi.org/10.1108/JDAL-03-2019-0006>
- Garnaut, J. (2023). Nuclear ambitions: The economic and strategic consequences of AUKUS. *Asia Policy*, 35, 24–37. <https://doi.org/10.1353/asp.2023.0014>
- Goh, E. (2016). Southeast Asia's strategic relations with the United States: A hedging strategy. *Asian Survey*, 56(3), 522–542. <https://doi.org/10.1525/as.2016.56.3.522>
- GovAU. (2021). AUKUS trilateral security partnership joint statement. Canberra: Australian Government.
- Hartley, K. (2016). *The economics of defence policy: A new perspective*. Routledge.
- Jennings, P. (2019). Australia's submarine strategy: The rise and fall of the Attack-class. *Naval War College Review*, 72(3), 60–78.
- Jennings, P. (2022). Australia's submarine saga: Collins to AUKUS. *Naval War College Review*, 75(1), 45–60.

-
- Katsumata, H. (2019). Hedging and regional order in Southeast Asia: The role of ASEAN. *Pacific Review*, 32(5), 675–697. <https://doi.org/10.1080/09512748.2019.1569110>
- Kuik, C. C. (2020). The essence of hedging: Malaysia and Singapore's response to China's rise. *Contemporary Southeast Asia*, 42(3), 338–365. <https://doi.org/10.1355/cs42-3c>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2018). *Naturalistic Inquiry* (Rev. ed.). Sage Publications.
- Markowski, S., & Hall, P. (2015). The challenges of defence procurement. *Defence and Peace Economics*, 26(3), 187–200. <https://doi.org/10.1080/10242694.2015.1023384>
- Medcalf, R. (2020). Indo-Pacific empire: China, America and the contest for the world's pivotal region. *Australian Journal of International Affairs*, 74(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1712094>
- Murphy, A. M. (2021). Indonesia and the Indo-Pacific: Recalibrating a foreign policy identity. *International Affairs*, 97(1), 111–129. <https://doi.org/10.1093/ia/iaaa168>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Rajagopalan, R. P. (2022). Alliance exclusivity and regional fragmentation: AUKUS and strategic stability. *The Washington Quarterly*, 45(1), 101–120. <https://doi.org/10.1080/0163660X.2022.2062585>
- Reilly, J. (2022). Hedging or balancing? Australia's China strategy under scrutiny. *Journal of Contemporary China*, 31(133), 425–442. <https://doi.org/10.1080/10670564.2021.1966891>
- Snyder, G. H. (2021). Strategic ambiguity and deterrence in asymmetric alliances. *Journal of Strategic Studies*, 44(6), 871–892. <https://doi.org/10.1080/01402390.2021.1877174>
- Storey, I., & Emmers, R. (2021). Naval strategy and future submarine procurement in the Indo-Pacific. *Contemporary Southeast Asia*, 43(3), 339–359. <https://doi.org/10.1355/cs43-3d>
- Tan, S. S., & Koh, C. T. (2021). Maritime ambiguity and strategic misalignment in the Indo-Pacific. *Marine Policy*, 134, 104802. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104802>
- Tan, S. S., & Singh, B. (2021). Australia's strategic recalibration in the Indo-Pacific: From hedging to hard alignment? *Defense and Security Analysis*, 37(4), 321–338. <https://doi.org/10.1080/14751798.2021.2003246>
- Taylor, B. (2021). Strategic ambiguity and the risks of AUKUS. *Survival*, 63(6), 55–70. <https://doi.org/10.1080/00396338.2021.2006823>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage Publications.